

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas ialah elemen kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Sebuah upaya dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*effective*” yang berarti suatu tindakan berhasil atau dilaksanakan dengan baik.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti memiliki efek, berhasil, ataupun memberikan hasil yang diinginkan. Secara umum, efektivitas merujuk pada keberhasilan atau pencapaian yang diharapkan

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran, serta mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya terkait dengan produktivitas, tetapi juga melibatkan persepsi dan sikap individu.² Menurut The Liang Gie dalam Halim, efektivitas merujuk pada keadaan di mana seseorang berhasil mencapai efek atau akibat yang diinginkan saat melaksanakan suatu tindakan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap efektif jika tindakannya menghasilkan dampak yang sesuai dengan yang diharapkan, serta tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai dalam kegiatan yang dilakukannya.³

Menurut Heinz Weihric dan Harold Koontz mengartikan efektivitas sebagai pencapaian sebuah tujuan.

¹ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan,” *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012): 0–216.

² Dwi Purwiyanti, “Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu),” *Katalogis* 5, no. 3 (2017): 190–200

³ R. Tunjung, “EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kab. Malang),” *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 16, no. 1 (2014): 84834,.

Emerson, seperti yang diungkapkan pada Handayaniingrat oleh M. Thorieq Shofa Afandi, menjelaskan bahwa efektivitas ialah ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu jika tujuan tersebut berhasil tercapai, maka dapat disimpulkan sebagai efektif.⁴ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pencapaian sasaran (baik dalam kualitas, kuantitas, maupun waktu) yang telah berhasil dicapai oleh pengelola. Suatu kegiatan dianggap efektif jika dilaksanakan dengan benar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah tugas yang mudah karena dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang dan oleh berbagai pihak yang berbeda. Efektivitas bisa diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Namun, jika hasil kerja dan tindakan yang dilaksanakan tidak sesuai, maka tujuan mungkin tidak tercapai sesuai harapan, dan dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif.⁵

Guna menilai apakah suatu program efektif atau tidak, diperlukan ukuran efektivitas. Menurut Campbell, ukuran efektivitas yang umum dan paling berpengaruh ialah⁶ :

- 1) Keberhasilan program
Kemampuan operasional dalam menjalankan rencana kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi penentu keberhasilan program. Evaluasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme serta proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 2) Keberhasilan sasaran
Pencapaian tujuan dengan fokus pada hasil output menjadi ukuran efektivitas yang digunakan. Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh

⁴ M. Thorieq Shofa Afandi, "Efektivitas Program Promosi Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Salatiga," *M. Thorieq Shofa Afandi* (2016): 1–8,.

⁵ M Thaib Hasan et al., "Peningkatan Sistem Kerja Produksi Untuk Meningkatkan Efektivitas Industri Kecil Di Kota Langsa (Studi Kasus Pada UD. Cita Rasa, Pabrik Roti, Kota Langsa)Informasi Artikel," *Jurnal Ilmiah Jurutera* 02 No. 01 (2015): 27–37.

⁶ Arni Eka Susantri, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus Di Kecamatan Kuranji Kota Padang," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 2, no. 1 (2018): 1.

mana tingkat output dari kebijakan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

- 3) Kepuasan terhadap program
Kepuasan program ialah indicator efektivitas yang mengukur sejauh mana program memenuhi kebutuhan pengguna. Kualitas produk atau layanan yang disediakan tercermin dalam tingkat kepuasan. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi pula kepuasan pengguna, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan bagi lembaga.
- 4) Kesesuaian input dan output
Efektivitas tingkat output dapat dilihat dari perbandingan antara input serta output. Apabila keluaran lebih besar dari masukan maka dikatakan efisien, begitupun sebaliknya
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh
Evaluasi efektivitas ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan secara keseluruhan. Ini melibatkan penelitian umum dengan mempertimbangkan berbagai kriteria tunggal untuk menilai efektivitas organisasi secara menyeluruh, sehingga program dapat dijalankan sesuai dengan kemampuannya.
Sedangkan tolak ukur menurut manajemen ajaran Islam bagi seorang muslim dalam mengatur hidupnya supaya efektif menurut Effendy dalam Dipta Kharisma yaitu :
 - a) Prinsip Keseimbangan
Artinya, dalam menjalankan sebuah kegiatan seorang muslim diharapkan bertindak secara harmonis, pantas, serta wajar dalam menjalankan kegiatan, tanpa berlebihan namun juga tidak pelit.
 - b) Prinsip Tidak Boros
Artinya, setiap muslim dalam melakukan kegiatan waktu, harta, serta tenaga tidak digunakan secara berlebihan.
 - c) Prinsip Mencapai Kemanfaatan
Artinya, dalam melakukan kegiatan, seorang muslim diharapkan agar usahanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, serta orang lain.
 - d) Prinsip Berlaku Adil

Agar dapat mencapai tindakan efisien, seseorang harus berlaku adil pada dirinya serta orang lain, dan adil dalam pengambilan keputusan serta perbuatannya.

Pengukuran keberhasilan sistem informasi yang dilakukan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, melalui penelitian mereka yang berjudul *the reformulated D&M is success model*. Mencakup 6 indikator dan beberapa point berikut⁷:

- 1) Kualitas sistem (*system quality*)
Kualitas sistem merujuk pada karakteristik informasi yang melekat pada sistem. Ini membahas mengenai karakteristik dari sistem yang digunakan, seperti fleksibilitas, sistem reliability, kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan sistem.
- 2) Kualitas informasi (*information quality*)
Kualitas informasi menunjukkan sejauh mana informasi tersebut dapat secara konsisten memenuhi persyaratan serta harapan para penggunanya. Ini diukur melalui ketepatan waktu, konsistensi, kelengkapan, relevansi, serta akurasi informasi yang disediakan.
- 3) Kualitas pelayanan (*service quality*)
Kualitas ini diukur melalui upaya perangkat keras serta perangkat lunak yang diperbarui, dapat diandalkan, kecepatan pelayanan kepada pengguna, dan kepentingan pengguna dalam mendapatkan layanan yang memadai.
- 4) Pengguna (*user*)
Pengguna sistem dinilai berdasarkan frekuensi penggunaan, waktu penggunaan, jumlah akses, pola penggunaan, serta tingkat ketergantungan terhadap sistem.
- 5) Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)
Kepuasan pengguna dapat diukur melalui beberapa komponen, termasuk konten, akurasi, format, kemudahan penggunaan, serta kepuasan aktual dalam menerima informasi.
- 6) Keuntungan bersih (*net benefit*)
Keuntungan bersih ini mencakup faktor-faktor seperti kemudahan kerja, manfaat yang diberikan, peningkatan

⁷ Dimas Gustino, “Delone& McLean Is Succes Model” .
(<https://sis.binus.ac.id/2019/04/11/delone-mclean-is-succes-model/>) diakses pada tanggal 16 Juni 2024)

produktivitas, efektivitas kerja yang ditingkatkan, serta peningkatan kinerja perusahaan.

c. Pendekatan Efektivitas

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas⁸ :

1) Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Efektivitas dalam pendekatan ini dianggap sebagai tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi secara internal.

2) Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan ini mengukur sejauh mana sebuah lembaga berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan. Fokus utamanya ialah pada realisasi sasaran yang realistis untuk mencapai hasil optimal, dengan memperhatikan hasil program dalam mencapai target output yang direncanakan.

3) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan ini menilai efektivitas berdasar kemampuan lembaga dalam memperoleh serta memelihara sumber daya yang diperlukan agar berfungsi secara efektif. Hal ini didasarkan pada teori keterbukaan lembaga terhadap lingkungannya.

2. QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*)

a. Pengertian QRIS

Quick Response Indonesian Standard atau QRIS ialah metode pembayaran digital yang menggunakan pemindaian QR Code yang dapat dibaca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.⁹ QRIS merupakan standar tunggal QR Code pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan QRIS, semua pedagang hanya memerlukan satu kode guna semua transaksi menggunakan aplikasi pembayaran e-money. QRIS merupakan model pertukaran terbaru yang

⁸ Jessica Luas, Marthen Kimbal, and Frans Singkoh, "Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon," Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2017): 1–12.

⁹ ASPI Indonesia, QRIS <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisc/> diakses pada 26 November 2023 pukul 21.58 WIB

canggih setelah penggunaan QR Code, serta telah umum digunakan oleh pelaku keuangan..

Salah satu alasan penggunaan sistem pembayaran angsuran yang terkomputerisasi ialah sebab banyak dealer yang telah menyediakan QR Code dari berbagai distributor guna mendorong pertukaran non tunai (*society cashless*). QRIS memiliki 3 jenis pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) Statis, Merchant Presented Dinamis, dan Customer Presented mode (CMP). Merchant merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang atau jasa serta memiliki kerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan pembayaran melalui e-money. Menurut Bank Indonesia, jenis pembayaran menggunakan QRIS yaitu:

- 1) Merchant Presented Mode (MPM) Statis
Pedagang hanya perlu memajang satu print-out atau stiker secara gratis. Pengguna cukup melaksanakan pemindaian, memasukkan jumlah transaksi, serta menerima notifikasi transaksi secara langsung baik dari pengguna maupun pedagang. QRIS MPM statis sangat sesuai untuk usaha mikro dan kecil.
- 2) Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis
QR disampaikan melalui perangkat seperti mesin EDC atau smartphone tanpa biaya tambahan. Pedagang harus memasukkan jumlah pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan bisa memindai QRIS yang ditampilkan atau dicetak. QRIS MPM dinamis cocok untuk pedagang dengan skala usaha menengah dan besar atau volume transaksi tinggi.
- 3) Customer Presented Mode (CPM)
Pelanggan hanya perlu menampilkan QRIS yang muncul dari aplikasi pembayaran mereka guna dipindai oleh pedagang. QRIS CPM lebih cocok untuk pedagang yang membutuhkan transaksi cepat, seperti penyedia transportasi, tempat parkir serta ritel modern.

Industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia mengembangkan QRIS guna memastikan proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, serta tetap aman. Menggunakan satu QR Code, penyedia barang dan jasa

(merchant) tidak perlu lagi menyimpan berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 ¹⁰

Gambar 2.1

Contoh Sistem Pembayaran Bersama Bank Indonesia



Sumber : bi.go.id

Sebelum diberlakukannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran. Masyarakat sering memakai pembayaran digital seperti Gopay, OVO, DANA dan lainnya untuk transaksi. Hanya dengan melihat QR Code di pedagang yang menampilkan merek uang elektronik tertentu, pengguna bisa membayar merchant dengan menggunakan saldo dari uang elektronik.

QRIS disusun menggunakan standar internasional europay, mastercard, visa (EMV) Co. Guna mendukung interkoneksi yang lebih baik, bersifat open source serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara, memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, instrumen, dan negara. Kini standar tersebut telah diimplementasikan di berbagai negara meliputi India, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan lainnya. Qris memiliki karakteristik UNGGUL yang meliputi :

1) Universal

Menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang memanfaatkan QR Code.

¹⁰ Bank Indonesia, kanal dan layanan <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> diakses pada 25 November 2023 pukul 18.34 WIB

- 2) Gampang
Sederhana digunakan, hanya membutuhkan satu QRIS guna semua aplikasi pembayaran.
 - 3) Untung
Kepuasan pengguna serta pedagang meningkat dengan akses pembayaran yang cepat serta mudah.
 - 4) Langsung
Transaksi QRIS diproses secara instan dengan notifikasi yang diterima segera setelahnya.¹¹
- b. Kelebihan dan kelemahan QRIS
- QRIS memiliki kelebihan serta kelemahan, kelebihan QRIS bagi pedagang memberikan manfaat :
- 1) Antisipasi dari adanya tindakan kriminal
Menggunakan uang elektronik dapat mengurangi kejahatan, banyaknya pencurian serta perampokan di jalan menjadi ancaman bahkan bagi orang yang memiliki uang tunai dalam jumlah besar
 - 2) Persaingan bisnis naik
Meningkatnya penggunaan uang elektronik mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, dengan harapan akan mengikuti pertumbuhan sektor bisnis di Indonesia
- Adapun manfaat bagi konsumen :
- 1) Transaksi lebih mudah dan cepat
Memakai QRIS menghilangkan adanya menunggu lama di kasir memberikan kembalian atau mengatasi masalah lainnya. Selain itu, pembayaran digital juga lebih higienis.
 - 2) Tidak perlu membawa uang tunai
Dengan QRIS, konsumen bisa melakukan transaksi pembayaran dengan mudah hanya dengan pemindaian kode QR, tanpa perlu membawa uang tunai.
- Selain keuntungan yang diperoleh, kelemahan dalam penggunaan QRIS saat ini terkait dengan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, yang juga sejalan dengan ketidakmerataan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di masyarakat. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang stabil. Bahkan di beberapa daerah penggunaan ponsel pintar hanya

¹¹ ASPI Indonesia, QRIS <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/> diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 22.06 WIB

umum di kalangan milenial. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam penggunaannya, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah serta kelompok usia lanjut yang mungkin belum terbiasa menggunakan perangkat *gadget*.

3. Media Pembayaran

a. Pengertian media pembayaran

Media pembayaran ialah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan serta sistem dari perbankan suatu Negara. Media pembayaran ialah sebuah sistem yang meliputi fasilitas operasional, pengaturan, mekanisme, serta kontrak yang telah digunakan guna penyampaian, penerimaan, pengesahan intruksi pembayaran. Media pembayaran sama seperti sistem pembayaran dimana sebuah sistem aturan, mekanisme, serta lembaga digunakan untuk mengirim uang sebagai pemenuhan kewajiban dalam aktivitas ekonomi. Media pembayaran menghasilkan gagasan tentang "uang" sebagai perantara dalam pertukaran barang, transaksi serta layanan keuangan¹².

Sistem pembayaran merujuk pada cara atau metode yang memfasilitasi pembayaran serta transfer dana antara satu bank dengan bank lain serta antar pembeli dengan penjual. Sistem pembayaran memiliki peran penting pada perekonomian serta infrastruktur keuangan. Dalam konteks ini, sistem pembayaran dianggap sebagai infrastruktur kunci bagi perdagangan serta dasar perekonomian. Sistem pembayaran menyediakan sarana untuk menyelesaikan transaksi perdagangan dengan mempertimbangkan nilai tukar melalui berbagai inovasi pembayaran.¹³

Keberhasilan sistem pembayaran bisa mendukung perkembangan sistem keuangan serta perbankan, sementara ketidaklancaran dalam sistem pembayaran suatu negara dapat memiliki efek negatif dalam kelancaran, stabilitas, serta aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga serta mengawasi keamanan sistem pembayaran. Infrastruktur

¹² Bank Indonesia. "Sistem pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah". <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> , diakses pada 2 Desember 2023 pukul 21.31

¹³ Solikin M. Juhro, "Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020),223

keuangan suatu negara memerlukan sistem pembayaran yang efisien, aman serta dapat diandalkan. Guna mencapai keamanan, perlindungan konsumen, serta stabilitas dalam pelaksanaan sistem pembayaran, diperlukan tanggung jawab bersama antara peserta dengan otoritas.

Meskipun sistem pembayaran terlihat sebagai metode yang sederhana untuk men transfer dana dari satu entitas ke entitas lainnya, pada kenyataannya proses ini rumit untuk memastikan bahwa dana yang dikirimkan aman, cepat, serta efisien. Memilih metode transaksi yang aman, handal dan efisien, serta memperluas aksesibilitas dan menjamin keamanan membutuhkan serangkaian komponen yang berinteraksi secara menyeluruh. Ini akan membolehkan transfer dana dengan rendah biaya serta minim risiko, dan memfasilitasi transaksi ekonomi yang lancer bagi pengguna.

b. Evolusi sistem pembayaran

Evolusi uang serta peranya dalam transaksi yang melibatkan berbagai sistem pembayaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun Lembaga dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan peradaban serta lembaga pembayaran yang digunakan juga mengalami perkembangan. Perubahan pada sitem pembayaran terus berkembang seiring dengan evolusi uang, yang dipengaruhi oleh tiga factor utama yaitu kebiasaan masyarakat, kebijakan otoritas, model bisnis serta inovasi teknologi. Metode pertukaran barang atau barter merupakan salah satu awal mula sistem pembayaran. Namun kendala muncul ketika salah satu pihak tidak benar-benar membutuhkan barang yang ditawarkan atau ketika kedua belah pihak tidak setuju pada nilai tukarnya.¹⁴

c. Media pembayaran Tunai

Secara umum, sistem pembayaran dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sistem pembayaran tunai serta non tunai. Perbedaan utamanya terletak pada jenis instrument yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang tunai (baik dalam bentuk uang kertas maupun koin) sebagai alat pembayaran.

¹⁴ Bank Indonesia”Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah”
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> .diakses pada 2 Desember 2023

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam penggunaan, serta bisa dipecahkan dalam nominal berapapun. Penggunaan uang tunai juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahannya ialah jika terjadi percetakan uang dalam jumlah yang berlebih, hal ini bisa menyebabkan inflasi serta meningkatnya harga barang.

d. Media Pembayaran Non tunai

Sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan mencakup Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, serta uang elektronik (baik berbasis kartu maupun server). Dalam hukum islam, transaksi non tunai diatur dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara ka,u. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Dari ayat Al-Quran sebelumnya, diperbolehkan bagi orang untuk terlibat dalam transaksi ekonomi selama dilakukan dengan baik serta sesuai dengan prinsip agama, namun perdagangan dianggap tidak sah jika melibatkan unsur MAGRIB, yaitu maisir, gharar, riba, serta batil. Sebaliknya, transaksi yang didasarkan pada kebahagiaan bersama, kejujuran, kesepakatan bersama, serta dilakukan secara sukarela ialah yang diperbolehkan, bukan karena adanya paksaan.¹⁶

Diperkuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik yang dinyatakan sah dengan ketentuan :

- 1) Uang elektronik ialah cara pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁵ Q.S. An-Nisa'/4:29.

¹⁶ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an, (Medan : Citapustaka Media Perintis,2012), h. 252.

- a) Dikeluarkan berdasarkan jumlah uang yang disetorkan di muka kepada penerbit
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media terdaftar
 - c) Jumlah nominal uang elektronik yang diurus oleh penerbit bukan merupakan titipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan
 - d) Digunakan guna melaksanakan pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- 2) Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah¹⁷

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM telah di nyatakan dalam UUD 1945 serta diperkuat oleh TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi untuk mendukung Demokrasi Ekonomi. Untuk menjaga serta mengembangkan bagian penting dari struktur ekonomi masyarakat, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah dibuat. Namun, mengingat dinamika yang terus berubah, definisi UMKM telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Usaha mikro ialah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang Undang.
- 2) Usaha kecil ialah suatu usaha yang memiliki ekonomi produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, tidak menjadi bagian dari Perusahaan atau cabangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar dan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang Undang.
- 3) Usaha menengah ialah suatu usaha yang memiliki ekonomi produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan cabang suatu perusahaan dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil maupun besar dengan memperhitungkan jumlah kekayaan bersih

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

(hasil penjualan tahunan) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang.¹⁸

Badan Pusat Statistik mendeskripsikan batasan untuk usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan jumlah pekerja atau karyawan dalam suatu usaha sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro merupakan sebuah usaha yang memiliki pekerja tetap kurang dari 5
- 2) Usaha kecil merupakan suatu usaha yang memiliki pekerja sebanyak 5 - 10 orang
- 3) Usaha menengah merupakan suatu usaha yang memiliki pekerja sebanyak 19-99 orang.

b. Kriteria UMKM

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru mengenai sektor UMKM, Peraturan pemerintah tersebut tertuang pada PP UMKM No.7/2021. Berdasarkan hal itu, UMKM di kelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil dari pendapatan tahunan, seperti dalam table dibawah ini :

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Usaha	Kekayaan Bersih/ Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal Rp 1M	Maksimal Rp 2M
Kecil	<Rp1M-Rp5M	<Rp2M-Rp15M
Menengah	<Rp5M-Rp 10M	<Rp15M-%50M

UMKM sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena UMKM yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional ekonomi dan politik sehingga dapat memajukan kembali perekonomian yang awalnya mengalami krisis. UMKM yang ada dan terus bertambah menjadikan semangat bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam usahanya, seperti dengan berinovasi dalam setiap produknya dan membuat berbagai sarana promosi yang menarik minat pembeli atau konsumen. Dari pengertian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa UMKM dalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perorangan dan tidak anak cabang perusahaan lain yang telah memiliki kriteria atau batasan tertentu.

¹⁸ Nurjaya, Manajemen UMKM, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022) h.1-2

c. Sentra UMKM di Jepara

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data mengenai sentra industri kecil di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 serta telah diupdate pada 19 Maret 2020 yaitu:¹⁹

Table 2.2
Sentra Industri di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Jumlah Industri
1	Kedung	158
2	Pecangan	1.484
3	Kalinyamatan	1.042
4	Welahan	137
5	Mayong	94
6	Nalumsari	128
7	Batealit	134
8	Tahunan	3.027
9	Jepara	740
10	Mlonggo	185
11	Pakis aji	0
12	Bangsri	110
13	Kembang	0
14	Keling	12
15	Donorojo	0
16	Karimunjawa	0
Jumlah		7.251

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penelitian menyertakan hasil penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian meringkasnya, termasuk penelitian yang telah dipublikasikan ataupun yang belum terpublikasi (seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya). Dengan langkah ini, penelitian yang akan dilaksanakan ditempatkan secara tepat untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya, serta penulis melakukan peninjauan terhadap karya-karya yang telah ada. Berikut merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan :

¹⁹ <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/03/19/686/banyaknya-sentra-industri-kecil-di-kabupaten-jepara-2018.html> Diakses pada 5 Desember 2023

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Ali Ikhsan (2020)	Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi QRIS	Menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis yang digunakan statistic deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia KPw Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS, berdasarkan lima tolak ukur yaitu keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh dapat disimpulkan efektif. Tantangan yang dihadapi Bank Indonesia KPw Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS mencakup

				budaya Masyarakat yang masih lebih condong menggunakan uang tunai, persepsi bahwa pembayaran elektronik, termasuk QRIS, dianggap tidak aman, serta kendala terkait jaringan yang tidak stabil ²⁰ .
2.	Rina Anasti Nasution (2021)	Analisis Presepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan	Pendekatan penelitian pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka	Temuan penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 sebagai upaya guna menyederhanakan pembayaran non-tunai menggunakan QR Code. QRIS merupakan bagian dari inisiatif untuk mencapai Sistem

²⁰ Ali Ikhsan, Skripsi: “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi QRIS” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020)

				Pembayaran Indonesia 2025, yang membantu UMKM melakukan pembayaran dengan lebih cepat, praktis, serta aman dalam mendorong mereka untuk menabung sebagian dari penghasilan mereka ²¹ .
3.	Oktavian a Banda (2020)	Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital	Menggunakan metode kuisioner skala Likert serta pengolahan data menggunakan regresi logistik biner.	Hasil penelitian ini ialah faktor presepsi memiliki dampak pada preferensi pembeli dalam memakai QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital ²² .
4..	I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni	Qris di Mata UMKM:Eksplorasi Persepsi Intensi UMKM Menggunakan Qris	Menggunakan metode Kuantitatif	Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa intensi UMKM untuk menggunakan

²¹ Rina Anasti Nasution, Skripsi: *Analisis Presepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021)

²² Oktaviana Banda Saputri, *Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital*, (Jurnal of Economic and Bussines Mulawarman : 2020)

	(2020)			QRIS dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : 1. Persepsi tentang manfaat 2. Persepsi kemudahan penggunaan 3. Pemahaman tentang QRIS 4. Pengaruh dari pihak eksternal 5. Persepsi hambatan²³
5.	Misbahul Maruf (2020)	Eksistensi QRIS dalam Pengembangan Fintech Pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)	Menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan studi kasus	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Warung Kopi Haji Anto menerapkan QRIS dengan dua metode, yaitu QRIS Merchant Present Mode (MPM) serta QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM). Faktor pendukung penerapan QRIS ini ialah penggunaan smartphone

²³ I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni, Qris di Mata UMKM:Eksplorasi Persepsi Intensi UMKM Menggunakan Qris, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: 2020)

				yang semakin umum dikalangan beragam masyarakat. Manajemen QR Code berbasis syariah sebagai sistem pembayaran di Kota Kendari dipandang dari empat prinsip manajemen Islam, yaitu : perencanaan (at-takhthith), pengendalian (ar-riqabah), penerapan (tathbiq), pemasaran (marketing)²⁴
6.	Josef Evan Sihalo, Atifah Ramadan dan Suci Rahmayanti (2020)	Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan	Metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan wawancara serta studi pustaka	Pada penelitian ini pembayaran non-tunai telah diadopsi oleh pedagang UMKM sebagai hasil dari penelitian sebelumnya. Transaksi non tunai berbasis chip serta server di tempat mereka.

²⁴ Misbahul Maruf, Skripsi: *Eksistensi QRIS dalam Pengembangan Fintech Pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)*, (IAIN Kendari: 2020)

				Banyak dari mereka menerima pembayaran melalui aplikasi e-wallet, termasuk QR Code yang bisa diakses langsung dari smartphone pelanggan. terdapat langsung diakses dari smartphone pelanggan, ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan manfaat bagi pedagang UMKM ²⁵
7.	Nindi Anindya Putri(2020)	Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code(Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick	Memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis	Temuan ini menunjukan bahwa penerapan QRIS di Kota Semarang kurang efektif, disebabkan oleh kendala internal serta eksternal di kota tersebut.

²⁵ Josef Evan Sihalohe, Atifah Ramadan dan Suci Rahmayanti, *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. (Jurnal Manajemen Bisnis: 2020)

		Response Code untuk pembayaran di Kota Semarang		Saat ini, Bank Indonesia hanya memberikan teguran lisan pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) karena hingga 1 Januari 2020, belum ada pemrosesan izin guna menggunakan QRIS dalam pembayaran. ²⁶
8.	Yulita Milla Pakereng dan Lusianus Heronimus (2023)	Evektivitas Penggunaan Payment Qris Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah	Menggunakan metode kualitatif. Teknik wawancara semi terstruktur.	Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS belum terbukti efektif. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap program QRIS, minimnya informasi tentang produk QRIS, serta keterlambatan dalam pencairan dana

²⁶ Nindi Anindya Putri, Skripsi: *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code(Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor21/18/PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran di Kota Semarang*. (UNNES: 2020)

				membuat pelaku usaha cenderung lebih memilih transaksi tunai ²⁷ .
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kesamaan serta perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaanya ialah keduanya membahas tentang pembayaran non-tunai serta meneliti penggunaan QRIS sebagai media pembayaran. Namun, perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara dengan mengambil beberapa UMKM sebagai objek penelitian, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada persepsi serta preferensi pedagang serta konsumen terhadap QRIS. Penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas QRIS Sebagai media pembayaran di UMKM Kabupaten Jepara, serta mengungkapkan kendala dan pandangan UMKM terhadap penggunaan QRIS.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir ialah aliran terstruktur dari keseluruhan proses penelitian berdasarkan berbagai teori yang telah di jelaskan dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada²⁸. Berdasarkan deskripsi teori serta penelitian terdahulu yang sudah di uraikan sebelumnya, dapat diuraikan bahwa penelitian ini menghubungkan antara berbagai variabel yang didasarkan pada berbagai teori yang telah dideskripsikan sesuai dengan penarikan dari teori William H. DeLone serta Ephraim R. McLean, yaitu teori *The Reformulated D&M is succes Model*. Teori ini berkaitan dengan pengukuran kesuksesan sistem informasi melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pengguna, kepuasan pengguna, serta keuntungan bersih. Demikian maka kerangka tersebut akan

²⁷ Yulita Milla Pakereng dan Lusianus Heronimus, *Evektivitas Penggunaan Payment Qris Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah*, (JUREMI: 2023)

²⁸ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metode Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan, 2017). Hal 56

mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data serta informasi dalam penelitian ini guna mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian didasarkan dari rumusan masalah yang dikembangkan terkait munculnya latar belakang permasalahan, yang kemudian melebar sampai pada rumusan masalah

1. Praktik transaksi penggunaan QRIS pada UMKM Jepara

QR Code Mekanisme pembayarannya dikenal sebagai Standar quick Response Code Indonesia (QRIS) beberapa UMKM di Jepara telah menerapkan pembayaran QRIS ini. Perkembangan UMKM di Jepara sendiri merupakan bentuk kebangkitan masyarakat dalam berwirausaha, dari industri kecil perlahan menumbuhkan kesejahteraan yang selama ini menjadi harapan bangsa, dengan teknologi yang semakin mempermudah dalam segala sektor perekonomian di Indonesia, memberi peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memulainya, mulai dari teknologi pemasaran yang telah dipermudah dengan adanya digital marketing, sampai proses transaksi non tunai berbasis server yang mulai diberlakukan. Praktik transaksi penggunaan QRIS pada UMKM Jepara Sebanyak 3.397 dari 11.527 UMKM di Kabupaten Jepara telah menggunakan sistem transaksi QRIS. Hal tersebut

menunjukkan penggunaan yang positif terhadap teknologi pembayaran digital di kalangan UMKM di wilayah tersebut. Dengan adanya QRIS, UMKM di kabupaten Jepara dapat menyediakan berbagai pilihan pembayaran digital kepada pelanggan mereka, memudahkan proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbisnis. Pemilihan teknologi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. QRIS, UMKM dapat menyediakan metode pembayaran yang lebih mudah bagi pelanggan, mempercepat proses transaksi, meningkatkan keamanan transaksi, serta memiliki rekam jejak transaksi yang lebih baik. Semua hal ini memudahkan UMKM saat mengatur keuangan lebih efisien, membuat perencanaan keuangan yang lebih tersusun serta tepat, memungkinkan pengambilan keputusan keuangan yang lebih tepat dan strategis. Kemudian dalam proses penggunaannya, transaksi memakai QRIS bisa dilakukan lewat dompet digital ataupun m-banking.

Peneliti disini akan menggali informasi dari pihak owner, karyawan, serta pembeli dari masing-masing UMKM terkait dari praktik penggunaan QRIS dimulai dari cara pembuatan, transaksi pembayaran hingga penarikan saldo dari dana QRIS. Peneliti berharap dari adanya praktik penggunaan QRIS menjadi peluang besar bagi UMKM Jepara untuk meningkatkan daya saing mereka. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Rina Anasti Nasution yang berjudul Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS sebagai alat Transaksi UMKM di Kota Medan.²⁹

2. Tolak Ukur Efektivitas Penggunaan Transaksi QRIS

Tolak ukur ini membahas mengenai karakteristik dari sistem informasi yang digunakan. Kualitas sistem dapat dinilai melalui berbagai metrik, termasuk kualitas data, kemudahan penggunaan, kemampuan beradaptasi, mobilitas, fungsionalitas, ketergantungan, integrasi, dan signifikansi. Komponen ini menitik beratkan pada aspek teknis suatu sistem informasi atau dalam konteks ini adalah QRIS, termasuk kendala, kinerja, dan kemudahan penggunaan. Kualitas sistem yang tinggi memastikan sistem beroperasi dengan lancar, tanpa gangguan atau waktu tidak aktif. Efektivitas penggunaan QRIS mempermudah pelaku usaha

²⁹ Rina Anasti Nasution, Skripsi: *Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS sebagai alat Transaksi UMKM di Kota Medan*, Medan : UIN Sumatera Utara, 2021)

serta konsumen saat melaksanakan transaksi pembayaran, jadi ukuran efektifitas pada keberhasilan program dan kepuasan terhadap program yang dikemukakan oleh William H.DeLone dan Ephraim R. McLean, melalui 6 komponen yaitu, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pengguna, kepuasan pengguna, serta keuntungan bersih. QRIS dalam transaksi memang memiliki banyak keunggulan. Salah satu keuntungannya adalah kemudahan dan keamanan yang ditawarkannya. Dengan menggunakan QRIS, tidak perlu membawa uang tunai jumlah besar, hingga dapat meminimalisir risiko hilangnya uang akibat pencopetan. Ini memberikan rasa aman serta nyaman oleh para pengguna, karena transaksi dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu khawatir akan keamanan uang yang dibawa.

Selain itu, penggunaan QRIS juga memudahkan proses transaksi UMKM. QRIS membebaskan pedagang dari kesulitan menangani uang tunai dalam jumlah besar di kasir mereka. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kecurangan dalam transaksi, karena pembayaran langsung tercatat dan terverifikasi melalui sistem pembayaran digital. Jadi, penggunaan QRIS bisa menyajikan efisiensi serta keamanan dalam proses transaksi bagi kedua belah pihak, baik pelanggan maupun pedagang.

Kualitas sistem QRIS secara garis besar sangat efektif, meskipun ada salah satu yang menganggap belum efektif dalam kualitas sistemnya. Dengan begitu kualitas siste QRIS berhasil memberikan nilai tambah pada penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah kualitas informasi Kelebihan utama dari penggunaan QRIS adalah kemudahan dalam bertransaksi.

Adanya QRIS, pembeli tidak perlu lagi repot membawa uang tunai, sehingga mengurangi keribetan dan kekhawatiran terkait dengan kehilangan uang fisik. Selain itu, proses transaksi yang cepat dan mudah melalui QRIS juga memberikan kenyamanan bagi pembeli, karena tidak perlu lagi menunggu lama atau menghadapi kerumitan dalam proses pembayaran. Selain itu, keamanan yang ditawarkan oleh QRIS juga memberikan rasa percaya diri bagi para pembeli, karena mereka tahu bahwa transaksi yang dilakukan lebih terjamin keasliannya, sehingga meminimalkan risiko pencurian atau penyalahgunaan data. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Ikhsan yang berjudul Efektivitas Kebijakan Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Transaksi QRIS³⁰.

3. Dampak Adanya Penggunaan QRIS

Setiap kegiatan yang dilakukan akan memiliki dampak, entah itu baik atau buruk. Dampak yang dirasakan tidak hanya bagi owner UMKM saja tetapi para karyawan serta pengguna QRIS pun juga turut merasakannya. Dalam penelitian ini, peneliti Kembali mengembangkan rumusan masalah dari adanya dampak penggunaan QRIS, karena QRIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembayaran bagi para pelaku UMKM. Dengan mempelajari implementasi QRIS di Jepara, menghasilkan banyak temuan dari para pelaku usaha yang mengandalkan QRIS sebagai media transaksi tau pembayaran non tunai. Dari penggunaannya memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Secara ekonomi penggunaan QRIS dapat meningkatkan kemudahan transaksi, keamanan transaksi, dan menghindari peredaran uang palsu. Penerapan QRIS memberikan dampak positif terhadap keamanan serta kemudahan bertransaksi, hingga mencegah adanya uang palsu. Secara ekonomi, penggunaan QRIS telah meningkatkan kenyamanan bertransaksi, keamanan bertransaksi, dan membantu menghindari peredaran uang palsu. Namun perlu dicatat bahwa masih terdapat kelemahan dalam penggunaan QRIS karena masih rentan terhadap kelemahan tertentu.

Sebelum diterapkannya QRIS, kemudahan bertransaksi bagi pelaku usaha bervariasi. Beberapa bisnis menganggapnya mudah, sementara yang lain menganggapnya sedang atau sulit. Keamanan transaksi juga beragam, dan beberapa bisnis merasa rentan. Selain itu, peredaran uang palsu juga mempunyai risiko. Namun, setelah penerapan QRIS, terdapat perbaikan yang nyata. Kemudahan bertransaksi meningkat secara signifikan bagi sebagian besar bisnis, menjadikannya lebih mudah dan aman. Hal ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman untuk transaksi keuangan. Meskipun beberapa bisnis masih menghadapi kerentanan, tren secara keseluruhan menunjukkan dampak positif terhadap kemudahan dan keamanan transaksi.

³⁰ Ali Ikhsan, Skripsi: “Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi QRIS” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020)

Dampak QRIS dalam mendorong perkembangan UMKM di Jepara, menyoroti potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembayaran bagi para pelaku UMKM. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS telah meningkatkan berbagai aspek secara signifikan, termasuk dampak ekonomi, kenyamanan bertransaksi, dan keamanan. Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan kemudahan bertransaksi, keamanan bertransaksi, dan peredaran uang palsu sebelum dan sesudah penerapan QRIS.

Penggunaan QRIS telah meningkatkan kenyamanan dan keamanan bertransaksi. Namun, juga digarisbawahi bahwa masih ada kerentanan dalam penggunaannya. Temuan penelitian ini menekankan potensi manfaat QRIS bagi UMKM di Jepara, sekaligus mengakui perlunya mengatasi kerentanan yang ada untuk lebih meningkatkan efektivitasnya. Kesimpulannya, penerapan QRIS telah menunjukkan dampak positif bagi UMKM di Jepara, khususnya dalam hal kenyamanan bertransaksi, keamanan, dan mitigasi peredaran uang palsu. Namun, penting untuk terus mengatasi kerentanan yang terkait dengan penggunaannya untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dan menjamin integrasi dalam ekosistem UMKM, dan juga dengan mempertimbangkan enam tolak ukur efektivitas sebelumnya yang telah dibahas pada analisis sebelumnya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Josef Evan Shihaloho, Atifah Ramadan dan Suci Rahmayanti, yang berjudul Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan³¹.

³¹Josef Evan Shihaloho, Atifah Ramadan dan Suci Rahmayanti, yang berjudul Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM di Medan, (*Jurnal Manajemen Bisnis*,2020)